

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di tingkat daerah pada dasarnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang yang cukup luas guna mengelola serta mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan berbagai program pembangunan di wilayahnya. Penerapan otonomi daerah tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan guna menaikkan kesejahteraan khalayak lewat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, lebih efisien, dan mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di tingkat lokal. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, daerah dituntut memiliki kemandirian fiskal, yaitu kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunannya dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.

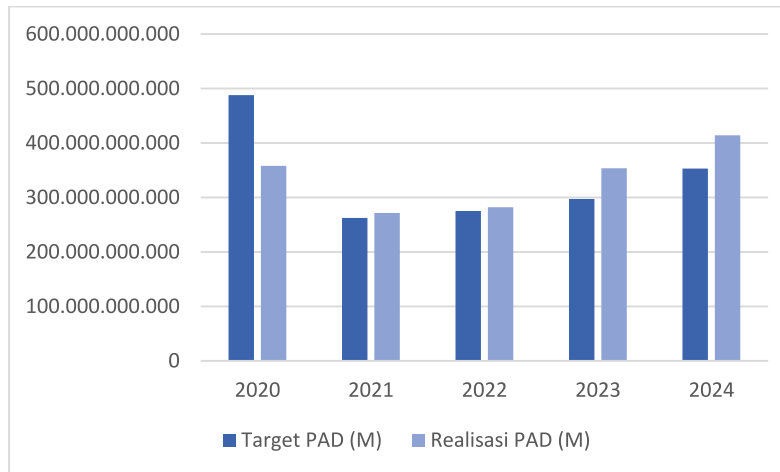
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah bagian dari sumber penerimaan yang diperoleh melalui berbagai sektor yang berkembang di wilayah suatu daerah, yang kemudian dipakai dengan tujuan membiayai beragam program pembangunan. Pajak menjadi bagian dari kontributor utama dalam struktur PAD. Besarnya potensi serta peran penting sektor perpajakan terhadap pembangunan ekonomi diharapkan mampu mencerminkan peningkatan kesejahteraan daerah, khususnya melalui kontribusinya terhadap PAD. Semakin besar PAD yang dapat dihimpun oleh sebuah wilayah, alhasil makin besar juga kapasitas daerah tersebut dalam

menjalankan otonomi daerah, sekaligus menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam mengelola pembangunan tanpa terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat (Sari *et al.*, 2020).

Salah satu ukuran penting dari kemandirian fiskal sebuah daerah ialah besarnya PAD. PAD ialah seluruh penerimaan daerah yang memiliki sumber berlandaskan atas potensi ekonomi daerah, yang dipakai guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD terdiri atas:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan daerah mencakup atas semua penerimaan berupa uang yang diterima dan masuk ke dalam kas umum daerah, yang berpotensi menyebabkan penambahan ekuitas dana serta menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode tahun anggaran, tanpa adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengembalikannya. Pada umumnya, struktur pendapatan daerah tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan (Purnamawati, 2021). Maka dari itu, pentingnya penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah agar pemerintah bisa menjalankan kewajibannya yaitu memperbaiki sarana dan prasarana di daerah tersebut.



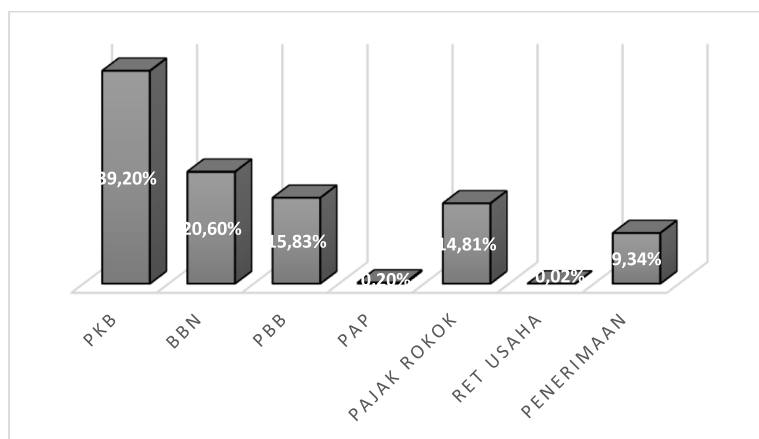
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Tahun 2020-2024

Gambar 1.1. Data Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 (Miliar)

Berlandaskan atas gambar 1.1. mengenai target serta realisasi PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2020–2024, terlihat adanya perkembangan yang positif meskipun sempat mengalami fluktuasi pada awal periode penelitian. Pada tahun 2020, target PAD sebesar Rp488,85 miliar hanya terealisasi sebesar Rp357,92 miliar atau 73,22 persen, menunjukkan dampak nyata dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2021, realisasi PAD mulai meningkat menjadi Rp271,66 miliar dengan capaian 103,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp262,47 miliar. Tren positif tersebut terus berlanjut sampai tahun 2024, di mana target PAD sebesar Rp353,06 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi Rp414,12 miliar atau 117,29 persen.

Peningkatan kinerja PAD dengan kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan telah berhasil menjalankan beragam pengupayaan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan realisasi PAD juga dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta berbagai kebijakan yang

difokuskan untuk mengoptimalkan sektor pajak daerah, terutama PKB yang memberi sumbangan cukup besar terhadap PAD. Tidak hanya sektor pajak, kontribusi dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya juga ikut mengalami peningkatan. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan isu krusial yang dihadapi oleh mayoritas semua negara, baik negara maju ataupun berkembang. Ketidakpatuhan dari wajib pajak dapat memicu terjadinya perilaku penghindaran, pengelakan, hingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Akibat dari tindakan tersebut adalah menurunnya penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya ketersediaan dana untuk mendukung program pembangunan ekonomi pemerintah. Di tingkat daerah, kepatuhan pajak juga memegang peranan penting dalam meningkatkan PAD. Salah satu bentuk pendapatan yang berperan besar dalam hal ini adalah PKB (Putri *et al.*, 2023).



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.2. Komponen Pajak Daerah Jawa Timur Tahun 2024

Berlandaskan grafik tersebut, mampu diinterpretasikan bahwasanya PAD didominasi oleh beberapa jenis pajak utama. PKB memberikan kontribusi paling besar dengan persentase sekitar 39,20%, menunjukkan bahwa sektor kendaraan bermotor ialah sumber penerimaan daerah yang sangatlah strategis serta stabil.

Selanjutnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 20,67%, yang menandakan tingginya aktivitas transaksi kepemilikan kendaraan di daerah tersebut. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berada pada urutan berikutnya dengan kontribusi sekitar 15,82%, mencerminkan tingginya konsumsi bahan bakar yang sejalan dengan mobilitas masyarakat.

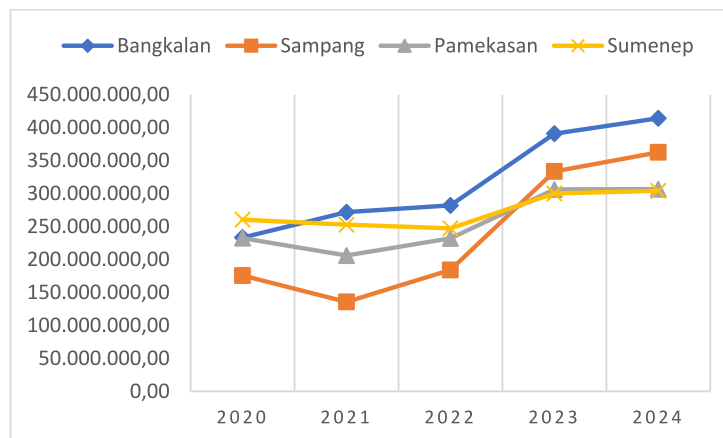
Sementara itu, Pajak Air Permukaan (PAP) memberikan kontribusi yang relatif kecil, yaitu sekitar 4,20%, yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan dari sektor ini masih terbatas atau belum dimaksimalkan. Pajak Rokok menyumbang sekitar 14,81%, menunjukkan peran yang cukup besar sebagai sumber PAD meskipun bukan yang utama. Adapun Retribusi Usaha memiliki kontribusi yang sangat kecil, hanya sekitar 0,02%, sehingga dapat dikatakan belum memberikan dampak berarti terhadap PAD. Terakhir, Penerimaan lain-lain menyumbang sekitar 9,34%, yang berperan sebagai pendukung pada struktur pendapatan daerah. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwasanya PAD sangat bergantung pada sektor PKB, khususnya PKB dan BBNKB. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah untuk tetap menjaga kinerja sektor tersebut sekaligus mengoptimalkan sumber PAD lain yang kontribusinya masih rendah agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan. Wardani & Rumiya (2017) berpendapat pertumbuhan total kendaraan bermotor di setiap tahunnya berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta memperbesar kontribusi terhadap PAD melalui pajak kendaraan. Upaya peningkatan tersebut akan lebih efektif jika didukung oleh peran aktif Samsat sebagai lembaga yang berwenang dalam pemungutan pajak. Kepatuhan wajib

pajak mencerminkan kesadaran pribadi individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan kebijakan yang ada. Secara umum, kepatuhan pajak merupakan kesiapan dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya selaras terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penerimaan pajak terbesar yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Penerimaan PKB bersumber dari jumlah penerimaan PKB dari wajib pajak yang patuh ketika melakukan pembayaran pajak. Hubungan antara kontribusi PKB dan PAD juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal secara adaptif. Saat realisasi penerimaan pajak meningkat hal ini menandakan bahwa strategi kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik dan mampu mengoptimalkan potensi sumber pemasukan daerah (Septriana *et al.*, 2025).

Ketika menjalankan asas otonomi daerah, bagian dari hambatan yang dirasakan ialah bagaimana menaikkan penerimaan daerah lewat sumber pajak, khususnya PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). PKB ialah pungutan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh masyarakat. Kendaraan bermotor sendiri berperan penting dalam menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga permintaan terhadap kepemilikan kendaraan secara berkelanjutan terjadi kenaikan. Maka dari itu, PKB dan BBNKB menjadi jenis pajak daerah yang mempunyai potensi penerimaan yang makin besar sejalan terhadap bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di masyarakat (Panggabean & Rinika, 2020). Pengelolaan dan pemungutan PKB ini dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan kerja sama sama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Gustaviana, 2020).

Setiap rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun pemerintah daerah perlu mempunyai wawasan yang mendalam terkait keadaan serta potensi wilayahnya agar perencanaan pembangunan serta penyusunan anggaran dapat dilakukan secara tepat dan terukur. ya akan memengaruhi penetapan target penerimaan PAD. Target tersebut harus dicapai secara optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama berlaku bagi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di mana target penerimaannya ditetapkan tiap tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya direalisasikan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Islami & Rahmawati, 2020).



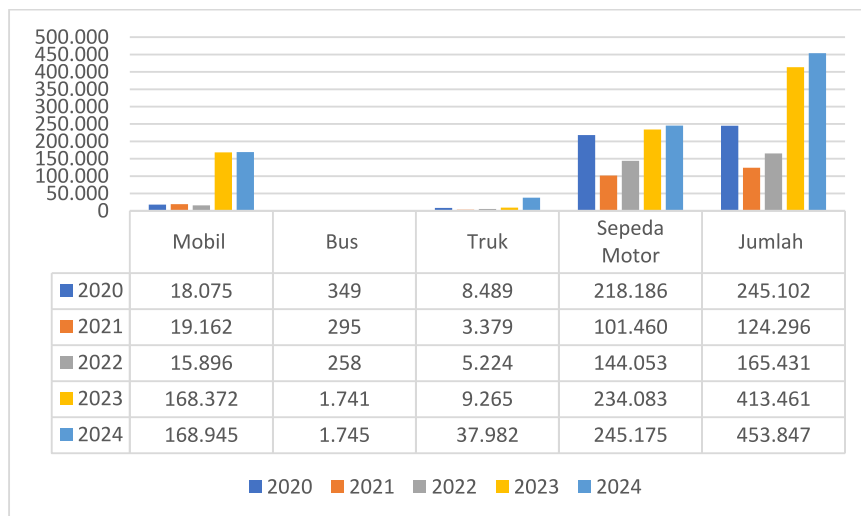
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.3. PAD 4 Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2020-2024 (Miliar)

Berlandaskan atas grafik PAD empat kabupaten di Pulau Madura periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangkalan menunjukkan kinerja PAD paling unggul dan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dibandingkan Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Peningkatan PAD Bangkalan yang stabil mencerminkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang lebih efektif serta tingginya aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu,

kabupaten lain cenderung mengalami fluktuasi dan pertumbuhan yang lebih lambat.

Kondisi terkini Kabupaten Bangkalan juga turut memengaruhi dinamika penerimaan daerah, termasuk dari sektor PKB. Berlandaskan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi daerah meraih sekitar 1,94%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berada pada kisaran -1,12%. Namun, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas kendaraan dan mobilitas masyarakat terus meningkat, optimalisasi PKB belum sepenuhnya tercapai.

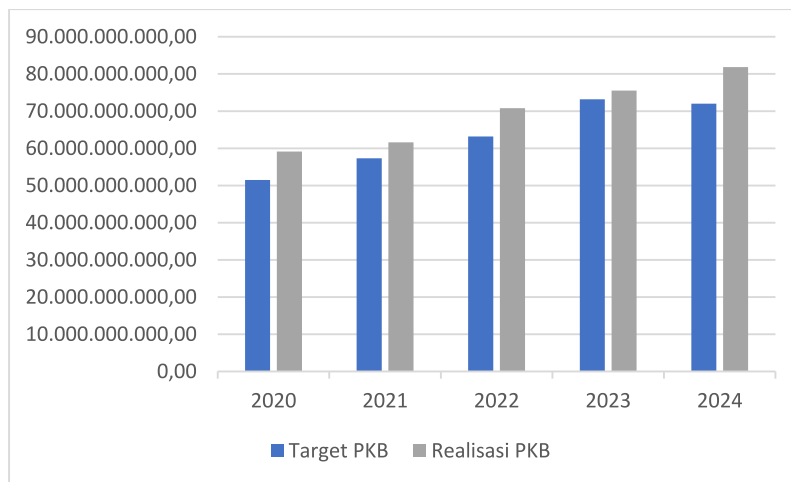


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Gambar 1.4. Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024

Berlandaskan atas gambar 1.4. mengenai total kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwasanya jumlah kendaraan dalam daerah tersebut ditemukan kenaikan yang cukup besar. Total kendaraan bermotor pada tahun 2020 tercatat sebanyak 245.102 unit, kemudian

meningkat menjadi 453.847 unit pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencapai sekitar 85 persen dalam kurun waktu lima tahun, yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bangkalan terus berkembang. Jenis kendaraan yang paling mendominasi ialah sepeda motor, berjumlah 245.175 unit pada tahun 2024 atau sekitar lebih dari separuh dari total kendaraan terdaftar. Dominasi sepeda motor ini menggambarkan bahwa kendaraan roda dua masih menjadi sarana transportasi utama masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.



Sumber: UPT PPD Bangkalan, 2026

Gambar 1.5. Data Target dan Realisasi PKB Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 (Miliar)

Gambar 1.5 yang berkaitan dengan target dan realisasi PKB di Kabupaten Bangkalan selama periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB menunjukkan tren yang positif dengan capaian rata-rata di atas target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, target penerimaan PKB sebesar Rp57,3 miliar berhasil terealisasi sebesar Rp61,59 miliar atau mencapai 107,49 persen dari target. Tahun berikutnya, realisasi PKB kembali meningkat menjadi Rp70,80 miliar dengan capaian 112,02 persen dari target Rp63,2 miliar. Pada tahun 2023, meskipun target dinaikkan menjadi Rp73,18 miliar, penerimaan yang

dicapai tetap melampaui target dengan realisasi Rp75,54 miliar atau 103,23 persen. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2024, di mana realisasi PKB mencapai Rp81,83 miliar dari target Rp72 miliar atau sebesar 113,66 persen.

Berdasarkan data UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, realisasi PAD selama tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Perihal tersebut menarik guna dilakukan pengkajian secara mendalam khususnya dalam menilai sejauh mana kontribusi PKB terhadap PAD selama periode tersebut. Meskipun demikian, setelah kondisi ekonomi mulai pulih pada tahun 2022 hingga 2024, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan penerimaan PKB melalui berbagai program, seperti pemutihan denda PKB, digitalisasi layanan pembayaran pajak, serta kerja sama dengan Samsat keliling dan e-Samsat.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pentingnya analisis kontribusi PKB terhadap PAD terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan sejauh mana sektor PKB berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dana yang berasal dari PKB tidak digunakan secara langsung pada satu sektor tertentu, melainkan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Pemanfaatan penerimaan PKB antara lain digunakan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah, seperti jalan dan fasilitas transportasi, mengingat tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh

masyarakat. Dana dari PKB juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi dan fasilitas umum yang menunjang aktivitas masyarakat. Penerimaan PKB turut berkontribusi dalam pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bangkalan, seperti pembangunan sarana pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta program pelayanan masyarakat.

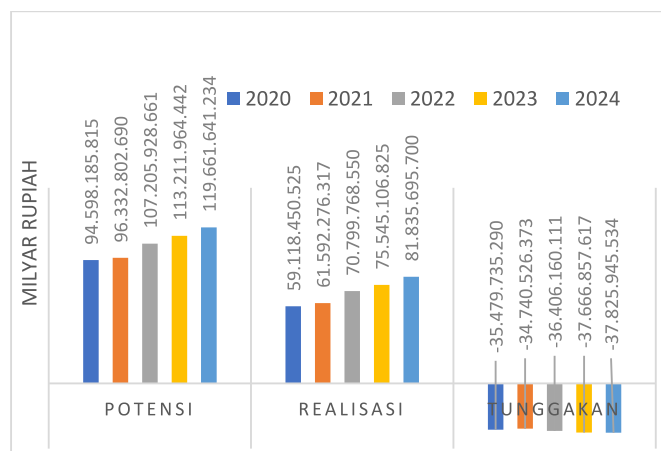
Tabel 1.1. Potensi dan Obyek Tagihan PKB Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024 (miliar)

Tahun	Potensi	Obyek Kendaraan
2020	Rp94.598.185.815	121.600
2021	Rp96.332.802.690	123.900
2022	Rp107.205.928.661	137.900
2023	Rp113.211.964.442	145.600
2024	Rp119.661.641.234	153.900

Sumber: KB SAMSAT Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jumlah obyek kendaraan di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 potensi PKB sebesar Rp94,59 miliar dengan jumlah obyek sekitar 121,6 ribu kendaraan. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp119,66 miliar dengan jumlah obyek sekitar 153,9 ribu kendaraan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar atau menjadi obyek pajak terus bertambah dari tahun ke tahun. Bertambahnya obyek kendaraan ini berdampak langsung pada meningkatnya potensi penerimaan PKB yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Besarnya potensi tersebut belum tentu seluruhnya dapat direalisasikan. Masih adanya wajib pajak yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu menyebabkan realisasi penerimaan

PKB sering kali lebih rendah dibandingkan potensinya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan karena daerah ini memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus meningkat setiap tahun, seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan PKB, yang dinilai adanya permasalahan dalam optimalisasi pemungutan pajak.



Sumber: KB SAMSAT Kabupaten Bangkalan

Gambar 1.6 Tunggakan Potensi dan Realisasi Kabupaten Bangkalan Tahun

2020-2024 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.6 mengenai selisih potensi dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai potensi penerimaan PKB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan atau peningkatan basis pajak di wilayah tersebut. Namun, peningkatan potensi tersebut tidak diikuti dengan realisasi penerimaan yang optimal. Realisasi PKB memang menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada di bawah nilai potensi yang seharusnya dapat dicapai. Akibatnya, selisih antara potensi dan realisasi (yang mencerminkan tunggakan) tetap tinggi setiap tahunnya. Bahkan, selisih tersebut cenderung

meningkat, dari sekitar 35,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar 37,8 miliar pada tahun 2024.

Meskipun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat tunggakan antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan PKB. Tunggakan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang belum berhasil dipungut secara maksimal oleh pemerintah daerah. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak sehingga penerimaan yang seharusnya dapat masuk pada tahun berjalan menjadi tertunda atau tidak terealisasi sepenuhnya.

Belum optimalnya penerimaan PKB juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, keterbatasan waktu masyarakat untuk melakukan pembayaran, serta masih adanya kendaraan yang telah berpindah kepemilikan tetapi belum dilakukan proses balik nama. Selain itu, meskipun berbagai inovasi pelayanan telah diterapkan, pemanfaatan layanan berbasis digital seperti e-Samsat juga belum sepenuhnya merata karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau belum terbiasa menggunakan layanan tersebut. Optimum merupakan nilai atau kondisi terbaik yang dapat dicapai dari berbagai alternatif yang tersedia untuk memenuhi tujuan tertentu. Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi atau hasil yang paling baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rumahorbo & Mansyur, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara awal yang juga sejalan dengan penelitian Santika & Jati (2023) belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga pembayaran pajak sering mengalami keterlambatan dan menimbulkan tunggakan.

Penelitian mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada umumnya masih belum menggambarkan secara mendalam bagaimana proses optimasi penerimaan pajak dilakukan oleh instansi pemungut pajak di daerah. Kajian yang ada cenderung hanya menyoroti aspek tertentu, seperti kepatuhan wajib pajak atau program pemutihan, tanpa melihat keseluruhan strategi yang diterapkan secara terpadu. Penelitian terdahulu belum mengkaji secara komprehensif berbagai upaya optimasi PKB dalam satu kesatuan analisis, seperti pemutihan pajak, layanan e-Samsat, Samsat Keliling, serta sosialisasi perpajakan. Padahal, keberhasilan peningkatan penerimaan PKB tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai strategi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana optimasi PKB dilaksanakan serta bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guna menyelidiki sebesar apa peran PKB dalam membentuk PAD digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan kontribusi kemudian dikategorikan berlandaskan atas kriteria Depagri (Muchtar *et al.*, 2017)

Tabel 1. 2. Perhitungan Persentase Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kategori
0%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%- 30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Tabel 1. 3. Persentase Kontribusi PKB Terhadap PAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi PKB terhadap PAD
2020	Rp59,12 M	Rp357,92 M	16,52%
2021	Rp61,59 M	Rp271,66 M	22,67%
2022	Rp70,80 M	Rp281,90 M	25,12%
2023	Rp75,55 M	Rp353,69 M	21,36%
2024	Rp81,84 M	Rp414,12 M	19,76%

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan selama tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun tetap memberikan kontribusi yang cukup besar. Pada tahun 2020 kontribusi PKB sebesar 16,52%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 22,67% dan kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 25,12% sebagai kontribusi tertinggi selama periode penelitian. Namun, pada tahun 2023 kontribusi PKB mengalami penurunan menjadi 21,36% dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi

19,76%. Penurunan persentase kontribusi ini bukan berarti penerimaan PKB menurun, melainkan karena peningkatan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan peningkatan realisasi PKB dan tetap menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dan strategis dalam menunjang pembangunan daerah serta pembiayaan pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan klasifikasi kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 dan 2024 termasuk dalam kategori “Kurang” karena berada pada rentang 10,10%–20%. Sementara itu, pada tahun 2021–2023 kontribusi PKB termasuk kategori “Sedang” karena berada pada rentang 20,10%–30%. Hal ini menunjukkan bahwa PKB memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan PAD, namun kontribusinya masih belum dominan sehingga optimalisasi penerimaan PKB masih perlu ditingkatkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis optimasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, strategi, serta faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan. Penelitian ini mengkaji optimasi PKB secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai upaya yang dilakukan, seperti program pemutihan pajak, layanan e-Samsat, Samsat Keliling, serta sosialisasi perpajakan dalam satu kerangka analisis. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji variabel tersebut secara parsial. Kebaruan lainnya adalah fokus penelitian pada konteks lokal, yaitu KB SAMSAT Bangkalan & UPT PPD Bangkalan, sehingga memberikan kontribusi empiris yang spesifik dan kontekstual dalam memahami bagaimana strategi optimasi PKB dilakukan serta dampaknya terhadap peningkatan PAD.

Harapannya, penelitian ini mampu memberi gambaran empiris terkait apa saja upaya yang secara nyata terhadap peningkatan realisasi PKB di Kabupaten Bangkalan. Di sisi lain, hasil penelitian juga harapannya mampu berperan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk pemerintah daerah ketika membuat kebijakan pemungutan pajak yang lebih optimal di masa mendatang, khususnya untuk mengoptimalkan kontribusi PKB terhadap PAD dalam rangka memperkuat kemampuan keuangan daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Maka dari itu, penelitian ini mempunyai judul “Optimasi Kontribusi PKB terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020–2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang sebelumnya, alhasil rumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Samsat Bangkalan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bangkalan serta implikasinya terhadap peningkatan penerimaan daerah.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Samsat Bangkalan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini mampu memberi manfaat di bawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini harapannya mampu mengembangkan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai peranan pajak daerah terhadap peningkatan PAD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: selaku bahan pengevaluasian dan pertimbangan guna melakukan perumusan aturan dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PKB.
- b. Bagi Masyarakat: memberikan pemahaman tentang pentingnya pembayaran PKB sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
- c. Bagi Peneliti Berikutnya: sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan mengenai optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap PAD.